



Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik  
Fakultas ISIP, Universitas Garut  
ISSN: 2087-1511

# PENGARUH EVALUASI KEBIJAKAN PROMOSI PRODUK WISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GARUT

Akbar Senjaya<sup>1</sup>; Aceng Ulumudin<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut

<sup>2</sup> Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Garut

## Abstrak

Tujuan penelitian ini menemukan data dan informasi mengenai besarnya pengaruh Evaluasi Kebijakan Promosi produk wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah survey deskriptif analisis dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian dan studi pustaka dan penelitian lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan angket.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey deskriptif dan Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut yang berjumlah 70 orang. Pengambilan sampel dengan teknik sensus yaitu seluruh populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dari tanggapan responden dari konsep evaluasi Kebijakan Promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sudah sangat baik. Sedangkan tanggapan responden terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut rata-rata setiap responden memberikan tanggapan sangat baik dan besaran pengaruh Evaluasi Kebijakan Promosi produk wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sebesar 39.69 % dan sisanya 60.31 % ditentukan oleh variabel lain.

**Kata kunci:** Evaluasi Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah.

## 1 Pendahuluan

Pembangunan sektor pariwisata sebagaimana kedudukannya sekarang ini, merupakan salah satu sektor unggulan (*leading sector*) dalam perekonomian Nasional yang senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Jika ditinjau dari aspek social ekonomi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan pemerintah, peningkatan penerimaan devisa meningkatkan kewirausahaan Nasional dan turut mendorong pembangunan di daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan digariskan bahwa promosi pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan

kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia.

Pembangunan kepariwisataan harus tetap memperhatikan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan kepariwisataan pada masa sekarang dan yang akan datang karena memiliki fungsi ganda, di samping sebagai aset sumber daya manusia, juga berfungsi sebagai sumber potensi wisatawan nusantara.

Pariwisata merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan wilayah regional dan nasional, karena pariwisata mencakup dan terkait dengan sektor lain seperti: kondisi politik, kamtibmas, telekomunikasi, perdagangan, dan industri serta sektor lainnya.

Agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Garut perlu melakukan promosi wisata yang terdiri atas promosi dalam dan luar negeri, menerbitkan *leaflet*, *booklet*, *guide book*, dan rekaman audio visual lainnya yang bermutu standar, pemasangan berbagai iklan dan artikel majalah internasional, berpartisipasi di dalam event-event internasional, nasional, dan regional yang berkaitan dengan promosi wisata.

Ada pun data kunjungan wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Garut dalam periode 3 tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 jumlah Wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Kabupaten Garut mencapai 1.511.680 wisatawan, dan dari Wisatawan Mancanegara mencapai 24.591 wisatawan, dan pada tahun 2016 jumlah wisatawan nusantara mencapai 2.010.121 dan wisatawan mancanegara mencapai 28.223 wisatawan, dan pada tahun 2015 dimana jumlah wisatawan nusantara mencapai 2.072.538, dan wisatawan mancanegara mencapai 28.699.

Dan hasil dari observasi penulis di lapangan berkaitan dengan evaluasi kebijakan promosi produk wisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah hal ini salah satunya disebabkan oleh pertanggung jawaban dari petugas lapangan kaitannya dengan mempromosikan produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut masih lemah serta dalam pengelolaan pariwisata di kabupaten garut pengelola tidak transparan dan lebih di dominasi oleh karangtaruna setempat dan tidak proporsional dalam menyerahkan hasil wisata di Kabupaten Garut.

Dari permasalahan tersebut penulis menemukan beberapa permasalahan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut kaitannya dengan evaluasi kebijakan promosi produk wisata dengan pendapatan asli daerah diantaranya adalah :

1. Kedisiplinan para pegawai dalam promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut belum optimal karena belum optimalnya karena belum sepenuhnya di dukung oleh akomodasi, sarana dan prasarana yang memadai.
2. Kurangnya sosialisai kepada pengusaha/masyarakat tentang promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sehingga pengusaha/masyarakat tidak tahu.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian dengan judul: "Pengaruh Evaluasi Kebijakan Promosi Produk Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut"

## **2 Kajian Teori**

Makna yang terkandung dari definisi tersebut yakni kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan publik mempunyai pusat perhatian terhadap apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam hal ini keputusan untuk

tidak melakukan sesuatu pun merupakan suatu kebijakan publik. Hal itu tentunya didasarkan pada pertimbangan masyarakat.

Menurut LAN RI (2004:138) Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan bangsa. Dalam suatu peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pelayan public harus memperhatikan proses dalam kebijakan tersebut menurut Lan RI (2004 :149) diantaranya:

1. Formulasi kebijakan.
2. Implementasi kebijakan, meliputi :
3. Evaluasi kinerja kebijakan.

Evaluasi kebijakan merupakan bagian dari proses perumusan suatu kebijakan yang diarahkan pada tercapainya tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam pengambilan keputusan kebijakan. Evaluasi merupakan salah satu tingkatan di dalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak. Evaluasi mempunyai definisi yang beragam, Dunn (2002:35), memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa:

“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2002:608).

Untuk lebih jelasnya menurut Dunn, (2002:610) tentang kriteria dalam evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut :

Tabel 1: Kriteria Evaluasi Kebijakan

<b>Tipe kriteria</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ilustrasi</b>
Efektivitas	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?	Unit pelayanan
Efisiensi	Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?	Unit biaya Manfaat bersih Rasio biaya-manfaat
Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?	Biaya tetap Efektivitas tetap
Perataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?	Kriteria Pareto Kriteria kaldor-Hicks Kriteria Rawls
Resposivitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?	Konsistensi dengan survei warga negara
Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?	Program publik harus merata dan efisien

Sumber : Dunn, (2002:610)

Sasaran yang telah dirumuskan dengan tepat dan mudah dapat dipahami oleh setiap anggota organisasi, sehingga sasaran yang ditetapkan bersama dapat dicapai dengan secara efektif. Efektif sasaran unit organisasi dapat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

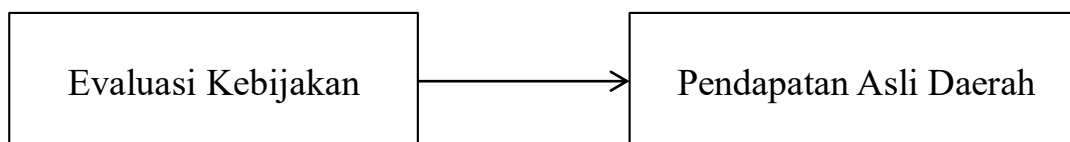
Dalam penjelasan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa: Pembangunan daerah sebagai sebagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, kolusi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Berbicara tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Mardiasmo (2003:132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Selanjutnya Sularno (2000:18) mengemukakan bahwa dalam peningkatan pendapatan daerah empat dimensi pokok yaitu :

1. Akuntabel, pertanggungjawaban dari pendapatan daerah tersebut dengan menciptakan tertib administrasi dalam tatanan organisasi.
2. Proporsional, kejelasan dalam pembagian dan pengelolaan pendapatan
3. Transparan, keterbukaan semua aspek dalam tatanan organisasi melalui pemantauan evaluasi dan koordinasi

Pendapatan daerah juga merupakan pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dan digali dari potensi pendapatan yang ada di daerah. Dengan kata lain pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber atau potensi yang ada pada daerah yang harus diolah oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah.

Dari penjelasan di atas bahwa hubungan antara kebijakan promosi produk wisata dengan pendapatan asli daerah di Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Garut sangat berkaitan sekali karena baiknya promosi wisata akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Adapun model penelitian disajikan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Model Penelitian

### 3 Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kausalitas, yang mana deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel yang diteliti sedangkan kausalitas untuk menge tahui hubungan antar variabel.

Alat ukur penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa kuesioner yang disusun secara terstruktur. Alat ukur penelitian ini digunakan sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian ilmiah.

#### 3.1 Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu evaluasi kebijakan promosi produk wisata (variabel X) dan pendapatan asli daerah (variabel Y). Selanjutnya, disusun operasional variabel penelitian sebagai berikut.

Tabel 2: Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Evaluasi Kebijakan	1. Efektivitas	- Kefektifan kerja - Ketercapaian program
	2. Efisiensi	- Usaha diperlukan - Hasil yang diinginkan organisasi
	3. Kecukupan	- Pencapaian Kebijakan
	4. Resposivitas	- Hasil dari kebijakan - Memuaskan kebutuhan Masyarakat
	5. Dimensi Ketepatan	- Ketepatan Waktu
Pendapatan Asli Daerah	1. Akuntabel	- Dapat dipertanggungjawabkan - Tertib Administrasi
	2. Proporsional	- Penagihan - Pengelolaan
	3. Transparan	- Evaluasi - Pelaporan

#### 3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dan seluruh stafnya, yang berjumlah 70 responden. Sedangkan dalam menentukan responden penulis menggunakan tehnik Sensus artinya semua pegawai dijadikan responden dalam penelitian ini.

#### 3.3 Alat Ukur dan Instrumen Penelitian

Alat ukur penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu berupa kuesioner yang disusun secara terstruktur. Alat ukur penelitian ini digunakan sebagai pedoman untuk mengukur variabel-variabel penelitian yang merupakan salah satu tahapan penting dalam penelitian ilmiah.

dalam melakukan penganalisaan hasil penelitian, yaitu untuk menguatitifikan data kualitatif, maka dilakukan analisis pembobotan dengan menentukan skor tertinggi yang dikurangi oleh skor yang terendah, dibagi ke dalam lima interval.

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2003). Oleh karena itu, untuk mengukur nilai jawaban dari angket atas pendapat dan persepsi dari setiap responden dan dari pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam Skala Likert adalah sebagai berikut:

Tabel 2: Penilaian Skala Likert

No	Pernyataan Positif	Nilai	Pernyataan Negatif	Nilai
1	Sangat Setuju	5	Sangat Setuju	1
2	Setuju	4	Setuju	2
3	C-D	3	C-D	3
4	Tidak Setuju	2	Tidak Setuju	4
5	Sangat Tidak Setuju	1	Sangat Tidak Setuju	5

Sumber: (Riduwan, 2003)

### 3.4 Teknik Analisis Data

Sedangkan data kuantitatif bersumber pada hasil penyebaran angket kepada responden. Data tersebut dianalisis secara statistik dengan menggunakan analisis statistik non-parametrik dengan menggunakan pendekatan Koefisien Korelasi Rank Spearman. Sedangkan untuk mengetahui besarnya Pengaruh Evaluasi Kebijakan Promosi Produk Wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dalam persentase, maka digunakan koefisien penentu atau koefisien determinan (KD).

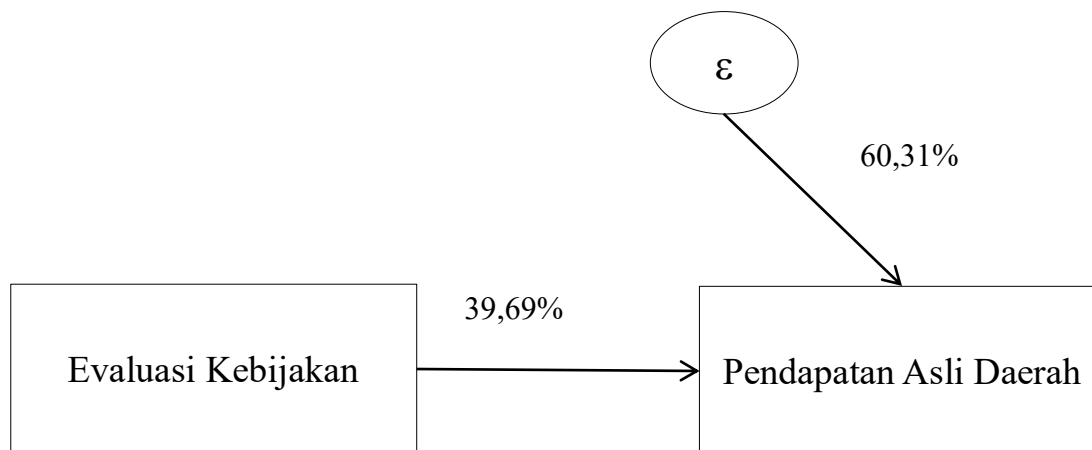
## 4 Hasil dan Implikasi

Berdasarkan tanggapan responden dari konsep evaluasi kebijakan promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut Rata-rata dari tanggapan responden dari konsep evaluasi Kebijakan Promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut yang menyatakan sangat setuju adalah 35 responden (50%), rata-rata responden yang menyatakan setuju adalah 32 responden (45%) dan rata-rata responden yang menyatakan ragu-ragu adalah 4 responden (5 %). artinya bahwa evaluasi Kebijakan Promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sudah menunjukan sudah sangat baik.

Sedangkan tanggapan responden terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut rata-rata setiap responden memberikan tanggapan sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut yang menyatakan sangat setuju adalah 30 responden atau 42.14% yang menyatakan setuju adalah 29 responden atau 41.43% dan yang menyatakan ragu-ragu adalah 12 responden atau 16.43%, artinya bahwa Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sudah sangat baik

Pengaruh evaluasi kebijakan promosi produk wisata terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Secara keseluruhan perhitungan statistika sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, pengaruh Evaluasi Kebijakan Promosi produk wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut

sebesar 39.69 % dan sisanya 60.31 % ditentukan oleh variabel lain, maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima, karena  $t_{hitung} \geq$  dari  $t_{tabel}$  dengan tingkat korelasi sebesar  $r_s = 0.63$  dan dengan taraf signifikan sebesar 10% atau  $\alpha = 0.1$  serta tingkat kepercayaan 90%, maka variabel Evaluasi Kebijakan promosi produk wisata (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut.



Gambar 2. Gambar Besarnya Pengaruh Variabel (X) Evaluasi Kebijakan Terhadap Variabel (Y) Pendapatan Asli Daerah.

## 5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil dari analisis dan pembahasan dari konsep evaluasi kebijakan promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sudah menunjukkan sudah sangat baik.
2. Sedangkan tanggapan responden terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut rata-rata sudah sangat baik
3. Pengaruh evaluasi kebijakan promosi produk wisata terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut. Secara keseluruhan perhitungan statistika sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis, pengaruh Evaluasi Kebijakan Promosi produk wisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut sebesar 39.69 % dan sisanya 60.31 % ditentukan oleh variabel lain.

## 6 Rekomendasi

Berlatar belakang dari hasil pembahasan dan kesimpulan maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam hal kebijakan promosi produk wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut pimpinan harus bisa menempatkan sumberdaya manusia yang kompeten dan bertanggung jawab dalam penyelesaian program wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut;



2. Pemerintah daerah harus sering adanya monitoring dan mengevaluasi promosi produk wisata lebih mendalam kaitannya dengan pengelolaan pajak daerah di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut dalam jangka waktu satu bulan sekali agar pendapatan asli daerah dapat meningkat dengan baik.
3. Sedangkan untuk penelitian lebih lanjut penulis menyarankan karena adanya temuan-temuan dilapangan maka diharapkan peneliti dapat mengadakan penelitian selain tema yang penulis teleiti dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Garut.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo, (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung
- Ardiwidjaja, Roby. (2007 ) *Pembangunan Pariwisata*, Bappeda Jawa Barat
- Dunn, William N, (2002), *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- LAN RI. (2004). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Ndongesia Buku I Prinsip – Prinsip Penyelenggaraan Negara*
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*. Bandung : Program Pascasarjana S2 dan S3 Ilmu Pemerintahan. Kerjasama IIP-UNPAD
- Nyoman S. Pendit, (2002). *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: Predya Paramita.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan*, Jakarta. PT. Bumi Aksara
- Markus, (2005). *Perpajakan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Prabukusumo.Y dan Pramusinto (1994). *Evaluasi Kebijakan Public*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Santoso, Bagus. (1995). “Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah, Studi Kasus Pasar Kabupaten di Sleman”, Prisma, No. 4, Tahun XXIV, 19-35.
- Sastropetro, Santoso. (1998). *Partisipasi, Komunikasi, Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : alumni
- Yoeti, Okie. (2003). *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Angkasa, Bandung

### **Dokumen**

- UU RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah
- UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah



- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Bupati Nomor 18 tahun 2012 tentang Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Garut No. 407 Tahun 2008
- Peraturan Gubernur No. 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Jawa Barat